

## BAB II

### LATAR BELAKANG KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah konsep Kebijakan Luar Negeri. Konsep ini dirasa mampu untuk menjelaskan keterkaitan antara Kolombia, yang bisa dianggap sebagai Negara lemah (*weak state*) dengan Amerika Serikat yang notabene dikenal sebagai Negara adikuasa. Kebijakan Luar Negeri suatu negara ditentukan oleh lingkungan dalam negeri serta lingkungan eksternal. Untuk itu akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

#### II.1 Pengertian Kebijakan Luar Negeri

Pengertian mengenai konsep kebijakan luar negeri yang akan dijabarkan adalah merujuk kepada Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, di mana **konsep kebijakan luar negeri** didefinisikan sebagai berikut<sup>13</sup>:

*“as the goals that the nation’s officials seek to attain abroad,  
the values that give rise to those objectives, and the means or  
instruments used to pursue them.”*

---

<sup>13</sup> Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *American Foreign Policy, Part I, Chapter*, (New York: St. Martin Press, Inc., 1996), hlm. 7.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan pula bahwa Kebijakan luar negeri adalah merupakan suatu cara yang digunakan oleh suatu negara yang diterapkan berdasarkan keadaan lingkungan domestik maupun eksternal demi mencapai tujuan nasionalnya dengan melalui penyebaran nilai-nilai dan menggunakan instrumen tertentu. Tiga hal yang perlu digarisbawahi dari definisi di atas adalah tujuan nasional, penyebaran nilai serta instrument yang digunakan demi pencapaian tujuan nasional tersebut.

## **II.2 Sejarah penerapan kebijakan luar negeri**

Kebijakan luar negeri AS pada dasarnya memiliki “keterikatan” dengan sejarah, sehingga kebijakan luar negeri AS memiliki beberapa elemen penting<sup>14</sup>. Pertama, pemikiran *fear of aliens* yang diterapkan dalam pembentukan kebijakannya, sehingga secara tidak langsung menjadi suatu *policy thinking* yang terus menyebar. Kedua, pemikiran mengenai kewajiban untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan yang mengancam secara universal. Ketiga, dalam upaya mencapai tujuan dari kebijakannya, AS tidak ragu-ragu untuk melakukan intervensi militer. Elemen-elemen ini terus menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan luar negeri AS dan nyaris tidak pernah berubah.

---

<sup>14</sup> Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *American Foreign Policy, Part I, Chapter*, (New York: St. Martin Press, Inc., 1996), hlm. 7.

Pembentukan kebijakan luar negeri AS tidak dapat terpisahkan dari sejarah AS itu sendiri. Bill Clinton, pada masa pemerintahannya, secara tidak langsung, menerapkan apa yang disebut dengan *Wilsonianism*. *Wilsonianism* atau disebut juga *Wilsonian idealism* adalah suatu pandangan idealis Woodrow Wilson yang menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang damai dan selalu hidup berdampingan di dunia. Pandangan ini berkaitan juga dengan pengertian demokrasi—sebagai suatu keadaan yang damai dan adanya jaminan *self-determination*—yang diangkat oleh Wilson. Oleh karena itu, dengan membentuk suatu Negara yang demokratis, maka individu atau Negara tidak lagi memiliki alasan untuk berperang<sup>15</sup>. Selain itu, *Wilsonian idealism* juga memandang bahwa *power* dan prinsip demokrasi dan liberalism akan mampi menghancurkan pandangan Marxisme-Leninisme dan komunisme Soviet. Konsep mengenai demokrasi *Wilsonian* ini menjadi dasar agenda kebijakan Clinton, meskipun Clinton lebih menekankan pada masalah-masalah domestiknya.

Tujuan utama kebijakan luar negeri AS masa Clinton ditekankan pada tiga obyektif<sup>16</sup>. **Pertama** adalah *promoting democracy*. Masalah penyebaran demokrasi di dunia memang menjadi perhatian yang terpenting dalam kebijakan luar negeri AS. Disebutkan oleh Clinton bahwa “*democracies don’t wage war on each other*”. Namun demikian, AS, Clinton khususnya, tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi tersebut, seperti apakah negara yang menjadi tujuan kebijakan tersebut mampu

---

<sup>15</sup> Henry Kissinger, “Diplomacy”, (New York: Simon & Schuster, 1994), dalam Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *Ibid.* hlm. 32

<sup>16</sup> Kegley dan Wittkopf, *Ibid.* hlm. 72-81.

mempertahankan demokrasi yang dibentuk karena tidak semua negara memiliki kemampuan dan kepentingan yang sama dengan AS. **Kedua** adalah *promoting prosperity*. Masalah peningkatan kesejahteraan ini erat kaitannya dengan demokrasi yang disebarkan oleh Clinton, yakni dengan menjadi demokratis, maka perekonomian akan meningkat karena diterapkannya *market-based democracy*. **Ketiga** adalah *enhancing security*. Masalah keamanan juga menjadi hal yang utama dalam kebijakan luar negeri Clinton karena nantinya akan memunculkan kestabilan baik domestik maupun internasional. Tujuan ketiga ini menekankan pada *low-intensity conflict and neo-containment, nonproliferation*, serta *multilateralism*.

Dalam pembentukan kebijakan luar negeri AS terhadap Amerika Latin, khususnya Kolombia, ada beberapa hal yang menjadi alasan. Pertama adalah, letak geografis antara Amerika Latin dengan AS. Kedekatan geografis tersebut membuat AS merasa sedikit terancam keamanan nasional. Terutama karena di Amerika Latin sering terjadi konflik sehingga dianggap bisa menjadi ancaman. Selain itu, pengaruh Amerika Latin terhadap posisi AS dalam lingkup global, ketersediaan sumber daya yang menguntungkan bagi AS, hubungan tradisional, hubungan perdagangan dan investasi, penyebaran pengaruh kepada Negara-negara Amerika Latin (seperti misalnya Brasil dan Meksiko), serta *humanitarian values*, juga menjadi *interests* bagi AS<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Harold Molineu, *U.S. Policy toward Latin America: From Regionalism to Globalism*, 2<sup>nd</sup> edition (USA: Westview Press, Inc.,1990), hlm. 9